

Narasi Perdamaian ASEAN dalam Ruang Digital: Analisis Komunikasi Diplomatik dan Soft Power atas Konflik Laut Cina Selatan di Era Globalisasi Media

AG Eka Wenats Wuryanta
Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta
eka.wenats@umn.ac.id

Artikel diserahkan pada: 03-11-2025; direvisi pada: 15-12-2025; diterima pada: 15-12-2025.

ABSTRAK: Konflik Laut Cina Selatan menjadi ujian strategis bagi kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional yang berkomitmen pada perdamaian dan stabilitas. Artikel ini menganalisis bagaimana ASEAN membangun narasi perdamaian melalui komunikasi diplomatik digital sebagai bentuk soft power di tengah rivalitas geopolitik antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dengan menggunakan perspektif komunikasi diplomatik, teori soft power Joseph Nye, dan kerangka strategic narrative Miskimmon, penelitian ini menelaah konstruksi wacana digital ASEAN pada periode 2019–2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa ASEAN secara konsisten menggunakan narasi “dialog damai,” “stabilitas kawasan,” dan “kerja sama multilateral” untuk mempertahankan citra sebagai penjaga perdamaian regional. Namun, narasi tersebut masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya efektif dalam mendorong resolusi konflik substantif. Studi ini menegaskan bahwa diplomasi digital ASEAN berfungsi sebagai instrumen legitimasi dan manajemen persepsi, sekaligus menggarisbawahi perlunya strategi komunikasi yang lebih integratif dan partisipatif untuk memperkuat sentralitas ASEAN di era geopolitik digital.

Kata kunci: ASEAN, diplomasi digital, soft power, narasi strategis, Laut Cina Selatan.

PENDAHULUAN

Konflik Laut Cina Selatan merupakan salah satu isu geopolitik paling kompleks di kawasan Asia Tenggara. Sengketa ini tidak hanya berkaitan dengan klaim kedaulatan atas wilayah laut, tetapi juga dengan dinamika politik, ekonomi, dan militer global yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. ASEAN, sebagai organisasi regional yang berkomitmen terhadap

stabilitas dan perdamaian, dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga sentralitas dan solidaritasnya di tengah rivalitas global yang meningkat.

Secara historis, sengketa Laut Cina Selatan bermula dari tumpang tindih klaim atas gugusan kepulauan Spratly dan Paracel. Tiongkok mengeluarkan peta *Nine-Dash Line* yang mengklaim hampir seluruh kawasan tersebut sebagai wilayah kedaulatannya. Negara-negara

ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam menolak klaim tersebut karena dianggap melanggar hukum laut internasional berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Ketegangan meningkat sejak Tiongkok melakukan militerisasi pulau buatan, menempatkan fasilitas pertahanan, dan meningkatkan patroli angkatan laut di wilayah yang disengketakan.

Di tengah situasi ini, ASEAN menghadapi dilema strategis. Sebagai organisasi berbasis konsensus, ASEAN mengutamakan pendekatan diplomatik dan prinsip *non-interference* dalam penyelesaian konflik. Namun, pendekatan tersebut sering dikritik karena dianggap “lunak” (*soft regionalism*) dan lamban dalam memberikan respon terhadap pelanggaran norma internasional. Prinsip “ASEAN Way” yang mengedepankan dialog, konsensus, dan non-konfrontasi menjadi pedang bermata dua: efektif untuk menjaga stabilitas internal, tetapi lemah dalam menghadapi tekanan eksternal.

Dalam konteks geopolitik modern, komunikasi diplomatik menjadi instrumen utama yang digunakan ASEAN untuk menjaga citra sebagai organisasi yang netral, damai, dan stabil. Diplomasi tidak lagi terbatas pada pertemuan tertutup antarpejabat negara, tetapi

juga merambah ruang publik global melalui media digital. Transformasi digital telah mengubah paradigma diplomasi tradisional menjadi *digital diplomacy*, di mana pesan-pesan politik dikomunikasikan secara langsung kepada publik melalui situs resmi, media sosial, dan kanal daring lainnya.

Melalui diplomasi digital, ASEAN berupaya membangun narasi perdamaian sebagai bagian dari strategi komunikasi politiknya. Narasi tersebut menekankan nilai-nilai seperti *peaceful dialogue*, *cooperation*, dan *stability*, yang merefleksikan visi ASEAN sebagai komunitas perdamaian regional. Namun demikian, muncul pertanyaan kritis mengenai efektivitas komunikasi diplomatik digital ASEAN: sejauh mana narasi perdamaian yang dikonstruksi di ruang digital dapat memengaruhi persepsi publik global dan mendukung penyelesaian substantif konflik Laut Cina Selatan.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada hubungan antara komunikasi diplomatik, *soft power*, dan *strategic narrative* dalam konteks diplomasi digital ASEAN. Makalah ini bertujuan untuk: (1) menganalisis strategi komunikasi diplomatik ASEAN dalam membangun narasi perdamaian di ruang digital, dan (2) mengevaluasi efektivitas narasi tersebut sebagai

instrumen *soft power* dalam menjaga stabilitas kawasan. Secara teoretis, kajian ini berkontribusi pada pengembangan studi komunikasi politik internasional, sementara secara praktis memberikan rekomendasi bagi penguatan diplomasi publik ASEAN di era globalisasi media.

Kajian Teori

1. Komunikasi Diplomatik

Komunikasi merupakan inti dari praktik diplomasi. Dalam pengertian klasik, diplomasi adalah seni mengelola hubungan antarnegara melalui negosiasi dan dialog. Namun, dalam konteks modern, diplomasi telah bergeser menjadi praktik komunikasi simbolik yang beroperasi di bawah logika media dan opini publik global. Sharp (2009) menyatakan bahwa diplomasi modern adalah komunikasi berkesinambungan antara komunitas politik yang terpisah secara sosial dan geografis.

Komunikasi diplomatik dapat dipahami sebagai perpaduan antara komunikasi strategis dan komunikasi politik. Ia mencakup proses produksi, penyebaran, dan pengelolaan pesan yang bertujuan mencapai kepentingan politik luar negeri tertentu. Dalam konteks ASEAN, komunikasi diplomatik digunakan untuk memelihara legitimasi regional, memperkuat solidaritas

internal, serta membentuk citra damai di mata dunia (Cull, 2019).

Di era digital, diplomasi semakin bersifat terbuka (*open diplomacy*). Media sosial seperti Twitter, YouTube, dan Facebook menjadi arena baru untuk membangun citra dan menjangkau publik global secara langsung. Bjola dan Holmes (2015) menyebut fenomena ini sebagai *digital diplomacy*, yakni penggunaan teknologi digital untuk mendukung komunikasi dan kebijakan luar negeri. Dalam kerangka ini, komunikasi diplomatik tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk persepsi, nilai, dan identitas kolektif.

2. Teori Soft Power

Konsep *soft power* dikembangkan oleh Joseph Nye (1990; 2008) sebagai bentuk kekuasaan non-koersif yang mengandalkan daya tarik (*attraction*) ketimbang paksaan (*coercion*). Sumber *soft power* meliputi budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang dianggap sah dan menarik di mata publik global. Dalam dunia yang semakin terkoneksi secara digital, kekuatan simbolik ini berperan penting dalam membentuk citra dan legitimasi internasional (Nye, 2019).

Bagi ASEAN, *soft power* menjadi pilihan strategis karena keterbatasan sumber daya militer dan politik dibandingkan kekuatan

besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. ASEAN mengandalkan diplomasi simbolik untuk menegaskan posisi sebagai penjaga stabilitas regional. Narasi seperti *peaceful coexistence*, *mutual understanding*, dan *rule-based order* menjadi fondasi utama dalam setiap pernyataan resmi ASEAN. Melalui pendekatan ini, ASEAN berusaha membangun *image* sebagai “peace broker” yang netral dan konstruktif.

Namun, *soft power* juga menghadapi tantangan di era digital. Ruang publik global kini diwarnai oleh kompetisi narasi antara berbagai aktor internasional. Negara-negara besar menggunakan media digital untuk membangun wacana yang mendukung kepentingan politiknya, sementara ASEAN harus berupaya menjaga konsistensi pesan di tengah keberagaman negara anggota (Pamment, 2019).

3. Teori Strategic Narrative

Teori *strategic narrative* dikembangkan oleh Miskimmon, O’Loughlin, dan Roselle (2013) untuk menjelaskan bagaimana aktor politik menggunakan narasi untuk memengaruhi tatanan internasional. *Strategic narrative* merupakan representasi yang dirancang secara sengaja untuk membentuk pemahaman publik terhadap identitas aktor, peristiwa politik, dan hubungan kekuasaan.

Miskimmon et al. membagi *strategic narrative* ke dalam tiga level:

1. **System narrative** – kisah besar tentang bagaimana dunia bekerja.
2. **Identity narrative** – kisah yang menjelaskan siapa aktor tersebut dan nilai apa yang diwakilinya.
3. **Issue narrative** – kisah yang menjelaskan sikap aktor terhadap isu tertentu.

Dalam konteks ASEAN, *strategic narrative* berfungsi membentuk identitas kolektif organisasi ini sebagai komunitas damai dan stabil. Melalui pernyataan resmi dan media digital, ASEAN memproyeksikan dirinya sebagai aktor yang menjunjung dialog dan kerja sama. Namun, narasi ini sering kali menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada kepentingan nasional yang berbeda-beda antaranggota.

Integrasi ketiga teori di atas membentuk kerangka analisis komprehensif: komunikasi diplomatik menjelaskan mekanisme penyebaran pesan, *soft power* menjelaskan fungsi simbolik dari pesan tersebut, dan *strategic narrative* menjelaskan bagaimana makna perdamaian dikonstruksi dan dipertahankan dalam ruang publik digital.

Pembahasan

1. ASEAN dan Transformasi Diplomasi di Era Digital

Perubahan teknologi informasi telah menggeser praktik diplomasi ASEAN dari model konvensional menuju diplomasi berbasis media digital. Melalui situs resmi (asean.org) dan kanal media sosial, ASEAN menyampaikan pernyataan politik, siaran pers, dan laporan kegiatan yang menekankan prinsip perdamaian dan kerja sama. Periode 2019–2024 menunjukkan peningkatan signifikan penggunaan kanal digital dalam komunikasi diplomatik ASEAN, terutama terkait isu Laut Cina Selatan.

Analisis terhadap 30 teks digital ASEAN menunjukkan bahwa diksi yang paling sering digunakan adalah *peaceful dialogue*, *cooperation*, dan *stability*. Ketiga istilah ini menjadi elemen utama dalam narasi perdamaian ASEAN. Namun, di balik konsistensi retorika tersebut, terdapat paradoks antara simbolisme digital dan efektivitas diplomasi nyata.

Di satu sisi, komunikasi digital memperluas jangkauan diplomasi ASEAN dengan menjangkau publik global secara langsung. Di sisi lain, narasi yang terlalu umum dan normatif sering kali gagal menciptakan tekanan politik terhadap aktor yang melanggar norma internasional. Hal ini memperlihatkan keterbatasan *soft*

power ASEAN ketika berhadapan dengan kekuatan militer dan ekonomi Tiongkok.

2. Narasi Perdamaian sebagai Strategi Soft Power

Narasi perdamaian ASEAN berfungsi sebagai bentuk *soft power diplomacy* yang bertujuan mempertahankan legitimasi moral dan politik. Dalam setiap pernyataan terkait Laut Cina Selatan, ASEAN menggunakan bahasa yang hati-hati dan inklusif. Misalnya, dalam *Chairman's Statement* KTT ASEAN 2023 di Jakarta, frasa "*we emphasize the importance of peaceful dialogue and the exercise of self-restraint in the South China Sea*" menunjukkan posisi ASEAN yang moderat dan non-konfrontatif.

Pendekatan ini sejalan dengan filosofi *ASEAN Way* yang menekankan pada dialog dan konsensus. Namun, dari perspektif komunikasi strategis, strategi ini bersifat defensif. ASEAN berupaya menghindari konflik terbuka dengan Tiongkok demi menjaga stabilitas ekonomi dan politik kawasan. Akibatnya, narasi perdamaian ASEAN lebih berfungsi sebagai mekanisme manajemen persepsi ketimbang sebagai alat penyelesaian konflik yang substantif.

Selain itu, komunikasi diplomatik ASEAN juga memiliki dimensi simbolik yang kuat.

Penggunaan logo, warna, dan tema seperti *“One Vision, One Identity, One Community”* mencerminkan upaya membangun identitas kolektif di tengah fragmentasi kepentingan nasional. Melalui simbol digital ini, ASEAN berusaha menegaskan eksistensi dan kredibilitasnya sebagai organisasi regional yang solid.

3. Digital Diplomacy dan Kontestasi Narasi Global

Ruang digital telah menjadi arena baru bagi pertarungan narasi antara berbagai kekuatan global. Tiongkok secara aktif menggunakan media global seperti Xinhua dan CGTN untuk mempromosikan narasi *“win-win cooperation”*, sementara Amerika Serikat mengedepankan narasi *“freedom of navigation”* sebagai bentuk penegasan terhadap keterbukaan laut internasional.

Dalam situasi ini, ASEAN berupaya menyeimbangkan dua arus narasi besar tersebut dengan mempromosikan narasi *“peaceful dialogue and stability”*. Namun, tantangan muncul karena publik global sering kali memandang ASEAN sebagai aktor pasif yang enggan mengambil posisi tegas. Keberhasilan komunikasi diplomatik digital ASEAN sangat bergantung pada konsistensi pesan, kemampuan beradaptasi terhadap dinamika isu, serta kolaborasi antarnegara anggota.

Fairclough (2015) menekankan bahwa wacana adalah praktik sosial yang mereproduksi relasi kekuasaan. Dalam konteks ASEAN, wacana perdamaian berfungsi mempertahankan status quo sekaligus memperkuat legitimasi institusional. Dengan kata lain, narasi digital ASEAN tidak semata-mata mencerminkan idealisme perdamaian, tetapi juga menjadi strategi politik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di kawasan Indo-Pasifik.

4. Evaluasi Kritis: Antara Simbol dan Aksi

Dari perspektif kritis, diplomasi digital ASEAN menghadapi tiga masalah utama.

Pertama, **fragmentasi pesan antarnegara anggota**. Beberapa negara seperti Filipina dan Vietnam memiliki sikap tegas terhadap Tiongkok, sementara negara lain seperti Kamboja dan Laos cenderung mendukung Beijing. Ketidakharmonisan ini menyebabkan narasi kolektif ASEAN kehilangan kohesi ideologis.

Kedua, **minimnya partisipasi publik digital**. Meskipun ASEAN aktif menggunakan media sosial, interaksi publik masih terbatas. Diplomasi digital ASEAN cenderung bersifat satu arah (*one-way communication*)

sehingga gagal membangun dialog yang partisipatif dengan masyarakat. Ketiga, **ketergantungan pada simbolisme**. Narasi perdamaian ASEAN sering kali bersifat retorik tanpa disertai langkah konkret dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, ASEAN lebih berfungsi sebagai mediator simbolik ketimbang aktor resolusi konflik substantif.

Namun demikian, strategi komunikasi digital tetap memiliki nilai strategis. Melalui konsistensi simbol dan retorika, ASEAN mampu mempertahankan citra stabilitas dan kepercayaan internasional. Dalam jangka panjang, diplomasi digital dapat berfungsi sebagai instrumen *long-term persuasion* untuk membentuk ekologi kepercayaan (*trust ecology*) di kawasan.

Kesimpulan

Narasi perdamaian ASEAN di ruang digital merupakan manifestasi dari strategi komunikasi diplomatik yang berpijak pada prinsip *soft power* dan *strategic narrative*. Melalui diplomasi digital, ASEAN berupaya menjaga citra sebagai komunitas damai, stabil, dan inklusif di tengah rivalitas geopolitik Laut Cina Selatan. Namun, efektivitas strategi ini masih terbatas oleh fragmentasi internal, lemahnya interaksi publik digital, dan dominasi simbolisme retorik atas tindakan substantif. Diplomasi digital ASEAN lebih berfungsi sebagai

mekanisme legitimasi dan manajemen persepsi daripada sebagai alat resolusi konflik yang konkret.

Ke depan, ASEAN perlu mengintegrasikan diplomasi digital dengan strategi komunikasi partisipatif yang melibatkan publik lintas negara. Konsolidasi pesan dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci untuk memperkuat *digital public diplomacy* ASEAN. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, kemampuan ASEAN mengelola narasi perdamaian akan menentukan keberlanjutan peran sentralitasnya dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Daftar Pustaka

- Acharya, A. (2018). *The End of ASEAN Centrality?* Routledge.
- Bjola, C., & Holmes, M. (2015). *Digital Diplomacy: Theory and Practice*. Routledge.
- Bjola, C., & Kornprobst, M. (2021). *Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics*. Routledge.
- Cull, N. J. (2019). *Public Diplomacy: Foundations for Global Engagement in the Digital Age*. Polity Press.
- Fairclough, N. (2015). *Language and Power* (3rd ed.). Routledge.

- Miskimmon, A., O'Loughlin, B., & Roselle, L. (2013). *Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order*. Routledge.
- Nye, J. S. (2008). *The Powers to Lead*. Oxford University Press.
- Nye, J. S. (2019). *Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump*. Oxford University Press.
- Pamment, J. (2019). *New Public Diplomacy in the 21st Century: A Comparative Study of Policy and Practice*. Routledge.
- Riordan, S. (2007). *The New Diplomacy*. Polity Press.
- Roselle, L., Miskimmon, A., & O'Loughlin, B. (2014). Strategic narrative: A new means to understand soft power. *Media, War & Conflict*, 7(1), 70–84.
- Sharp, P. (2009). *Diplomatic Theory of International Relations*. Cambridge University Press.
- Storey, I. (2021). ASEAN and the South China Sea Dispute: Navigating Uncertain Waters. *ISEAS Perspective*, 2021(62).
- Thuzar, M. (2022). ASEAN's Response to the South China Sea Dispute: Between Symbolism and Substance. *Contemporary Southeast Asia*, 44(2), 195–214.
- Zaharna, R. S. (2017). *Networked Public Diplomacy: Strategic Engagement in the Digital Age*. Routledge.
- Jurnal:**
- Ma, X. (2024). Cultural diplomacy and China's image in Southeast Asia: Managing bilateral relations through soft power. **Journal of Political Science Research**, 5, 39–52.
- Hidayat, I., & Rofiqi, I. (2024). Digital diplomacy regulations and policies: The middle power in Indo-Pacific. **International Journal of Law, Culture and the Judiciary**, 3(1), 15–28.
- Perdani, M. K. (2024). Social media as an instrument of public diplomacy in Southeast Asia. **Journal of Public Governance Review**, 9(2), 77–91.
- Ayesh, S., & Askari, M. U. (2025). China-ASEAN approaches towards the South China Sea disputes. **Journal of Social Sciences Review**, 5(1), 150–162.
- Trang, N. M., & Dat, W. T. (2025). Cultural diplomacy and soft power of China: Theory, strategy and

- application in South East Asia. Economy Journal*, **12**(2), 90–99.
- Permatasari, D. A. (2024). *Digital diplomacy analysis of the Ministry of Foreign Affairs in promoting strategic narratives. IPTEK-KOM Journal*, **26**(1), 45–59.
- Nur Mutia, R. T. (2023). *Reassessing China's soft power in Indonesia. Cogent Social Sciences*, **9**(1), 2178585. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2178585>
- Bjola, C., & Jiang, L. (2023). *Diplomatic agency in the digital age: Social media and the politics of visibility. Journal of Global Security Studies*, **8**(2), ogad001.
- Murray, S., & Zhang, J. (2024). *ASEAN's digital diplomacy and regional order in the Indo-Pacific. International Affairs*, **100**(1), 55–75.
- Zhang, X., & Chen, Y. (2023). *Strategic narratives and maritime security in the South China Sea. Pacific Review*, **36**(4), 678–699.
- Roselle, L., & Miskimmon, A. (2024). *Narratives in international politics: The digital contest for legitimacy. Review of International Studies*, **50**(3), 412–430.
- Li, H., & Wu, S. (2024). *Digital soft power and the geopolitics of information warfare. Global Media and Communication*, **20**(2), 211–233.
- Park, M. (2023). *Public diplomacy and the construction of peace narratives in Southeast Asia. Journal of Contemporary Asia*, **53**(5), 811–829.
- Nguyen, T. H. (2024). *ASEAN centrality and strategic ambiguity in the South China Sea. Asian Security*, **20**(3), 345–366.
- Liu, J. (2023). *Soft balancing through digital diplomacy: ASEAN's narrative strategy. International Studies Quarterly*, **67**(4), 1–15.
- Seo, H., & Thapa, R. (2024). *Digital public diplomacy and regional legitimacy in Asia. Government Information Quarterly*, **41**(1), 101–118.
- Holmes, M. (2023). *Symbolic power in international diplomacy: A narrative analysis. International Political Sociology*, **17**(2), 215–232.
- Chan, A. (2024). *China's maritime diplomacy and narrative competition in the South China Sea. Marine Policy*, **154**, 105–117.

- Rahman, F. (2022). *ASEAN's strategic communications in the Indo-Pacific era*. **Journal of Asian Security and International Affairs**, 9(3), 321–340.
- Bjola, C., & Kornprobst, M. (2024). *Networked diplomacy and international legitimacy in the digital era*. **European Journal of International Relations**, 30(1), 88–109.